

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024



BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU



Jalan. Jend. Sudirman No. 6 Simpang Tiga 28284

Telp (0761) 859750, 859752, 859754, 859756 Fax (0761) 859750, 859755

Laman <https://bapenda.riau.go.id>, Pos-el bapenda@riau.go.id

PEKANBARU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pekanbaru, 21 Maret 2025

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,



SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE, MM, CA, CRMP, QGIA, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19710729 199302 1 003

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmatnya sehingga dapat diselesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Riau Tahun 2024 ini yang disusun berdasarkan capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap unit kerja di lingkungan BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Amanatnya untuk semua OPD setingkat eselon II agar mempersiapkan Rencana Strategis OPD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya berdasarkan sasaran yang tercantum dalam Renstra. LKjIP merupakan merupakan dokumen pelaporan wajib yang berfungsi sebagai indikator akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKjIP bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Demikian laporan ini disusun semoga dapat bermanfaat untuk bahan evaluasi dari pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2024 untuk meningkatkan pelayanan publik dalam hal perpajakan sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Riau. Untuk kesempurnaan kinerja berikutnya kami mohon saran dan tanggapan untuk meningkatkan kinerja BAPENDA Provinsi Riau.

Pekanbaru, Februari 2025

Kepala BAPENDA Provinsi Riau


EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19720628 199703 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi	1
1.3 Tugas dan Fungsi BAPENDA Provinsi Riau	3
1.4 Aspek Strategis Organisasi	7
1.5 Permasalahan Utama	24
1.6 Tindak Lanjut Hasil evaluasi SAKIP BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2023	25
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	27
2.1 Rencana Strategis BAPENDA Provinsi Riau	27
2.2 Perjanjian Kinerja BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2024.....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 Capaian Kinerja BAPENDA Provinsi Riau	30
3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	31
3.1.1.1 Sasaran 1 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.....	32
3.1.1.1.1 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023	32
3.1.1.1.2 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Renstra BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2019-2024.....	33
3.1.1.1.3 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Capaian Nasional.....	34
3.1.1.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan	35
3.1.1.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	36
3.1.1.1.6 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran	37

3.1.1.2 Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pendapatan Daerah.....	38
3.1.1.2.1 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023	38
3.1.1.2.2 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Renstra BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2019-2024.....	39
3.1.1.2.3 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Capaian Nasional.....	40
3.1.1.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan	41
3.1.1.2.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	41
3.1.1.2.6 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran	42
3.1.1.3 Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja	42
3.1.1.3.1 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023.....	43
3.1.1.3.2 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Renstra BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2019-2024	44
3.1.1.3.3 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Capaian Nasional.....	45
3.1.1.3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan	46
3.1.1.3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	46
3.1.1.3.6 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran	46
3.2 Realisasi Anggaran	47
BAB IV PENUTUP	48
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Langkah Strategis	48

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja BAPENDA Tahun 2024

Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah ASN BAPENDA Provinsi Riau Berdasarkan Golongan/ Pangkat Tahun 2024	8
Tabel 1.2 Jumlah ASN BAPENDA Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan/ Eselon Tahun 2024	9
Tabel 1.3 Jumlah ASN BAPENDA Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	10
Tabel 1.4 Daftar BMD Gedung dan bangunan gabungan intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Provinsi Riau Tahun 2024	12
Tabel 2.1.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2024	28
Tabel 2.2.1 Perjanjian Kinerja BAPENDA Provinsi Riau	29
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja Interval Nilai Realisasi Kinerja Penilaian Realisasi Kinerja	30
Tabel 3.2 Capaian Kinerja BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2024	31
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023.....	33
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Renstra BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ..	34
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Nasional	34
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023.....	39
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Renstra BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ..	40
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Nasional	40
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023.....	44
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Renstra BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2019-2024..	45
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Nasional.....	45
Tabel 3.12 Capaian Realisasi Anggaran BAPENDA Tahun 2024.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Organisasi BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2024	3
Gambar 1.2	Jumlah ASN BAPENDA Provinsi Riau Berdasarkan Golongan/ Pangkat Tahun 2024	9
Gambar 1.3	Jumlah ASN BAPENDA Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan/ Eselonering Tahun 2024	10
Gambar 1.4	Jumlah ASN BAPENDA Provinsi Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Riau Tahun 2024 merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan. Selain itu juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif serta perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BAPENDA menuju terwujudnya good governance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) ini sebagai gambaran capaian kinerja BAPENDA yang bersifat taktis dan strategis, serta mengacu pada Visi dan Misi strategis berbasis analisis kinerja.

Kinerja Badan Pendapatan Daerah diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis (SS) sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BAPENDA Provinsi Tahun 2024 sebagai kontrak kinerja BAPENDA Provinsi Tahun 2024.

1.2. Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dibentuk melalui Peraturan Daerah (PERDA) Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, yang merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah dibidang keuangan pada sektor pendapatan daerah. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana di atur oleh Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, tugas pokok Badan Pendapatan Provinsi Riau adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan khususnya pada pengelolaan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Riau terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris yang membawahi 1 (satu) Kepala Subbagian, 4 (empat) Kepala Bidang yang masing-masing membawahi 2 (dua) Kepala Subbidang, dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Badan

2. Sekretaris membawahi :

- a. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Jabatan Fungsional Subbagian Perencanaan dan Program;
- c. Jabatan Fungsional Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. Kepala Bidang Pajak Daerah membawahi :

- a. Kepala Subbidang Penerimaan PKB dan BBN KB;
- b. Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya;
- c. Jabatan Fungsional Subbidang Verifikasi, Pelaporan dan Publikasi Pajak Daerah.

4. Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil membawahi :

- a. Kepala Subbidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
- b. Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
- c. Jabatan Fungsional Subbidang Dana Bagi Hasil Pajak.

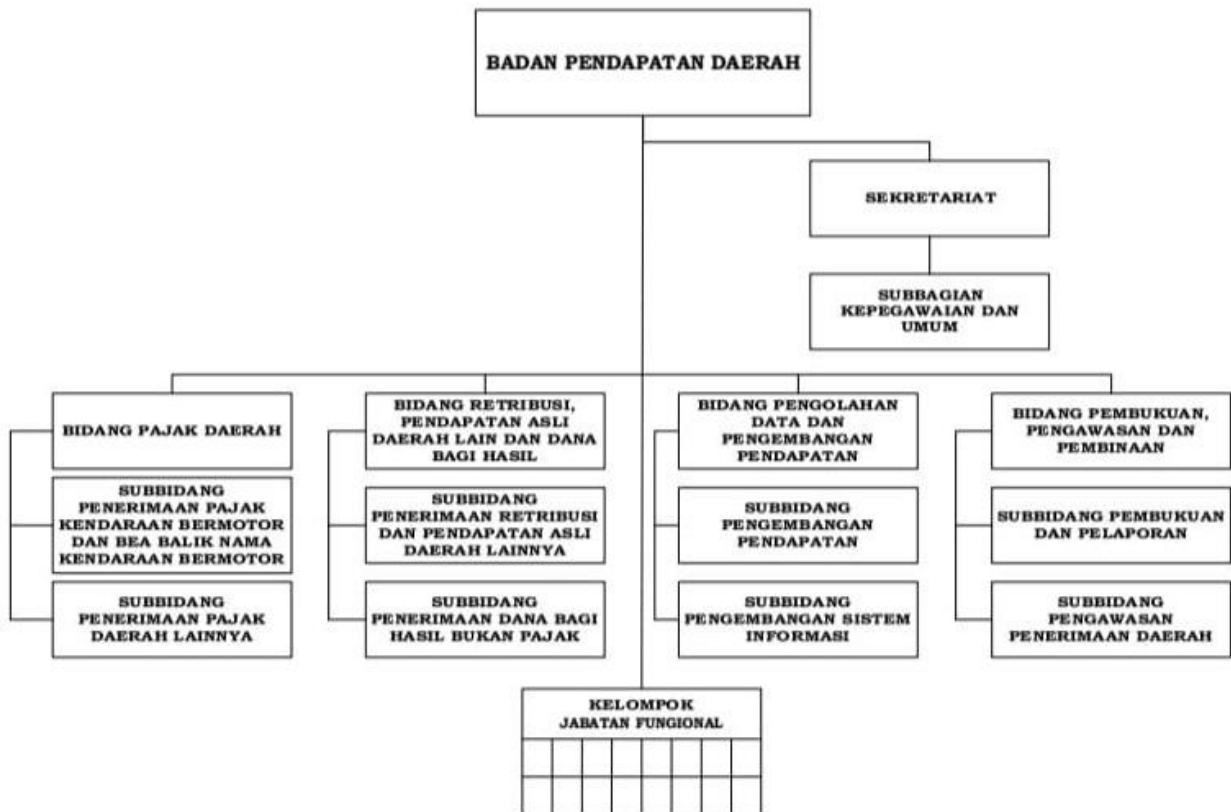
5. Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan membawahi:

- a. Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan;
- b. Kepala Subbidang pengembangan Sistem Informasi;
- c. Jabatan Fungsional Subbidang Pengolahan Data Pendapatan.

6. Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan membawahi :

- a. Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;
- b. Kepala Subbidang Pengawasan Penerimaan Daerah;
- c. Jabatan Fungsional Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan.

Gambar 1.1
Bagan Organisasi BAPENDA Provinsi Riau



Sumber : Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023

1.3. Tugas dan Fungsi BAPENDA Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam pelaksanaan tugas fungsinya yaitu :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil, Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, serta Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil, Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, serta Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan.
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil, Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, serta Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan.

4. Pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil, Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, serta Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara detail tugas dan fungsi masing masing jabatan pada BAPENDA Provinsi Riau sebagai berikut :

I. Kepala Badan

- 1) Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil, Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, serta Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil, Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, serta Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan
- 3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil, Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, serta Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan
- 4) Pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil, Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, serta Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

II. Sekretaris

- 1) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keuangan, Laporan Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan Daerah;
- 2) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
- 3) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi Perencanaan Program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
- 4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
- 5) Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pembahasan dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka perencanaan program/kegiatan dan penganggaran Badan Pendapatan Daerah;
- 6) Pengoordinasian penghimpunan standar operasional prosedur Badan Pendapatan Daerah; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

III. Kepala Bidang Pajak Daerah

- 1) Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada Bidang Pajak Daerah;
- 2) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Pajak Daerah;
- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang pajak daerah, meliputi antara lain kegiatan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, penerimaan pajak daerah lainnya, serta verifikasi dan pelaporan pajak daerah;
- 4) Penyusunan perhitungan target dan realisasi bagi hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota;
- 5) Pelaksanaan rekonsiliasi, koordinasi dan penyaluran bagi hasil Pajak Daerah dengan Instansi terkait dan Kabupaten/Kota;

- 6) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Pajak Daerah;
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

IV. Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil

- 1) Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil;
- 2) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil;
- 3) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil, meliputi antara lain Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak, dan Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
- 4) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi Hasil; dan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

V. Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan

- 1) pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan;
- 2) penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan;

- 3) pelaksanaan kebijakan di bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan, meliputi antara lain Pengembangan Sistem Informasi, Pengembangan Pendapatan, serta Pengolahan Data Pendapatan;
- 4) pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan;
- 5) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

VI. Kepala Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan

- 1) pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan;
- 2) penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan;
- 3) pelaksanaan kebijakan di bidang pembukuan, pengaawasan dan pembinaan, meliputi antara lain Pembukuan dan Pelaporan, Pengawasan Penerimaan Daerah, serta Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan;
- 4) pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan; dan
- 5) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau terus mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak, ini dapat terlihat dari penerimaan pajak daerah yang meningkat dari target yang telah ditentukan setiap tahunnya. Terdapat tiga jenis pajak yang terus dioptimalkan demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Riau setiap tahunnya. Selain itu, dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dalam setiap tahunnya tentunya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau juga harus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan

Sampai saat ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dibantu oleh 43 Unit Pengelolaan Pendapatan pelayanan yang terdiri dari 20 kantor UPT Pengelolaan Pendapatan dan 23 kantor UP Pengelolaan Pendapatan yang tersebar di 12 kabupaten / kota se-Riau, 1 pelayanan samsat keliling, 1 loket pelayanan pada Mall Pelayanan Publik kota Pekanbaru, serta 1 loket pelayanan pada Samsat Drive Thru.

Pagu anggaran yang diberikan pada BAPENDA pada tahun 2024 pada anggaran murni sebesar Rp.218.186.052.370 dan pada anggaran perubahan sebesar Rp. 248.793.344.477 dengan rincian mencakup 3 Program, 10 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai saat ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau memiliki sumber daya aparatur sebanyak 520 orang terdiri dari 299 laki-laki dan 221 perempuan, yang tersebar di Kantor Pusat dan 20 UPT dan 22 UP Pengelolaan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Riau.

a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan/Pangkat Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, didukung dengan 520 orang Aparatur Sipil Negara dengan perincian digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah PNS/ASN BAPENDA Provinsi Riau
Berdasarkan Golongan/Pangkat Tahun 2024

No	Gol/Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persen
1	Golongan IV	39	18	57	10,96
2	Golongan III	234	195	429	82,50
3	Golongan II	27	7	34	6,54
Jumlah		299	221	520	100

Sumber : Data BAPENDA Per Desember 2024

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 diketahui bahwa Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau berjumlah sebanyak 520 orang, yang didominasi oleh Golongan III berjumlah 429 orang atau 82,50%, Golongan IV yang berjumlah 57 orang atau 10,96%, sedangkan untuk Golongan II berjumlah 34 orang atau 6,54%.

Secara sederhana kondisi Pegawai Negeri Sipil menurut golongan/pangkat dapat dilihat gambar berikut ini :



Gambar 1.2 Jumlah ASN/PNS BAPENDA Provinsi Riau berdasarkan Golongan/Ruang Tahun 2024

b. Jumlah ASN BAPENDA Provinsi Riau berdasarkan Jabatan/Eselonering

ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang berjumlah 520 orang, berdasarkan jabatan/eselon dapat dilihat sebagaimana data pada tabel 1.2. berikut :

Tabel 1.2
Jumlah ASN BAPENDA Provinsi Riau
berdasarkan Jabatan/Eselon Tahun 2023

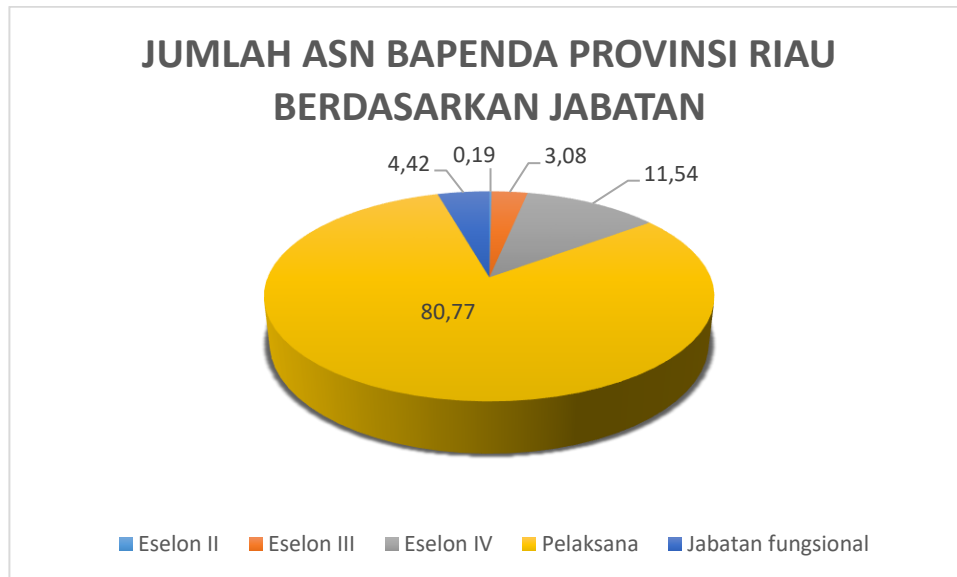
No	Jabatan/Staf	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persen
1	Eselon II		1	1	0,19
2	Eselon III	12	4	16	3,08
3	Eselon IV	42	18	60	11,54
4	Pelaksana	233	187	420	80,77
5	Jabatan fungsional	16	7	23	4,42
Jumlah		287	214	520	100

Sumber : Data BAPENDA Per Desember 2024

Dari data pada Tabel 1.2. diketahui bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Jabatan/Eselonering di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, didominasi oleh Jabatan Pelaksana yang berjumlah 420 orang

atau 80,77%. Untuk Esselon II berjumlah 1 orang atau 0,19%. Sedangkan Eselon IV sejumlah 60 orang atau 11,54% dan eselon III berjumlah 16 orang atau 3,08% yang tersebar di Kantor Induk dan sejumlah UPT/UP Pengelolaan Pendapatan se-Provinsi Riau, sedangkan untuk Jabatan Fungsional berjumlah 23 orang atau 4,42%.

Secara sederhana gambaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau menurut Jabatan/Eselon dapat dilihat gambar berikut ini :



Gambar 1.3 Jumlah ASN/PNS BAPENDA Provinsi Riau berdasarkan Jabatan/Eselonering Tahun 2024

c. Jumlah ASN BAPENDA Provinsi Riau berdasarkan Tingkat Pendidikan

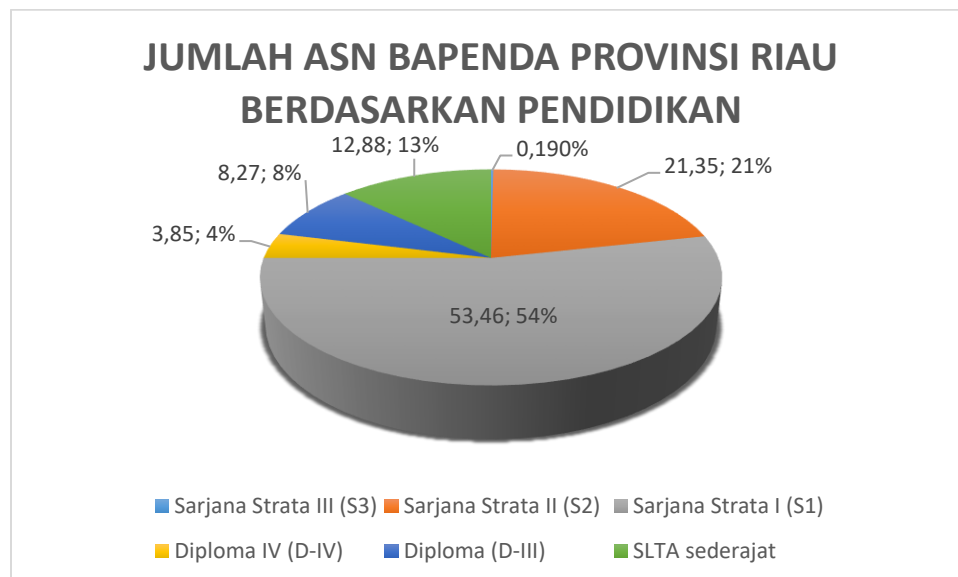
Secara umum tingkat pendidikan ASN BAPENDA Provinsi Riau sejumlah 520 orang dan rata-rata cukup baik serta sesuai standar pendidikan yang dibutuhkan, untuk lebih jelasnya digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3
Jumlah ASN BAPENDA Provinsi Riau
berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persen (%)
1	Sarjana Strata III (S3)	1		1	0,19
2	Sarjana Strata II (S2)	66	45	111	21,35
3	Sarjana Strata I (S1)	157	121	278	53,46
4	Diploma IV (D-IV)	13	7	20	3,85
5	Diploma (D-III)	23	20	43	8,27
6	SLTA sederajat	40	27	67	12,88
Jumlah		287	214	520	100

Sumber : Data BAPENDA Per Desember 2024

Berdasarkan tabel 1.3 dari 520 orang ASN BAPENDA Provinsi Riau terdapat 111 orang atau 21,35% yang berpendidikan Sarjana Strata II (S-2), yang berpendidikan Sarjana Strata I (S-1) sejumlah 278 orang atau 53,46%, yang berpendidikan Diploma IV sejumlah 20 Orang atau 3,85%, yang berpendidikan Diploma III (D-III) sejumlah 43 orang atau 8,27%, serta yang berpendidikan SLTA berjumlah 67 atau 12,88% dan akan digambarkan melalui diagram berikut ini :



Gambar 1.4 Jumlah ASN/PNS BAPENDA Provinsi Riau berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

Seiring dengan tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang merata di setiap Kantor Cabang Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau berkeinginan untuk mewujudkan pemenuhan fasilitas publik secara bertahap dan memperbanyak jenis-jenis pelayanan tertentu yang dirasakan dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan publik.

d. Sarana dan Prasarana Bapenda Provinsi Riau

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Riau memiliki 20 UPT dan 22 UP Pengelolaan Pendapatan yang harus mempunyai standar sarana prasarana yang layak sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 4 Tahun 2023 tentang emantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Evaluasi Kinerja terkait sarana dan prasarana layanan publik ini setiap tahunnya diadakan penilaian melalui kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB.

Berikut daftar sarana dan prasarana yang ada di Bapenda Provinsi Riau sesuai yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang Tahun 2024 seperti pada table dibawah ini :

TABEL 1.4
DAFTAR BMD GEDUNG DAN BANGUNAN GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
PROVINSI RIAU

Pengguna Barang : BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
Kode Lokasi :14.71.09.00.5.02.0.00.0.00.01.0000.

No	Kode Barang	Nama Barang	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Lokasi	Titik Koordinat	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Harga Satuan Perolehan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	Keterangan
1	2	3	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1.3.3.	GEDUNG DAN BANGUNAN						75			91.020.728.398,82				
	1.3.3.01.	BANGUNAN GEDUNG						67			84.736.338.165,09				
	1.3.3.01.01.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA						66			84.463.805.296,99				
	1.3.3.01.01.01.	BANGUNAN GEDUNG KANTOR						33			75.449.742.359,43				

1	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0001	Bangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Riau	Jl.Jend.Sudirman No.6 Pekanbaru		Pemerintah Daerah Tk I Riau	1	unit	17.191.373.010,57	17.191.373.010,57	pengadaan	1 januari 2003	hak Pakai	Penambahan nilai tahun 2024 dikarenakan adanya rehab kantor Rp. 1471837636 untuk kantor induk dan rehab UPT Simpang Tiga Rp. 348619470 (Bangunan Kantor Induk dan Kantor UPT Simp Tiga adalah Satu Bangunan)
2	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0009	Bangunan Gedung Cek Fisik Pendapatan Provinsi Riau	Jl.Jend.Sudirman No.6 Pekanbaru		Pemerintah Daerah Tk I Riau	1	unit	211.706.563,27	211.706.563,27	pengadaan	1 januari 2003	hak Pakai	
3	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0062	Tray Bilboard	Jl.Jend.Sudirman No.6 Pekanbaru		Pemerintah Daerah Tk I Riau	1	unit	5.997.900,00	5.997.900,00	pengadaan	19 Agustus 2011	hak Pakai	
4	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0058	Bangunan Gedung Samsat Drive Thru UPT SIMPANG TIGA	Jl.Jend.Sudirman No.6 Pekanbaru		Pemerintah Daerah Tk I Riau	1	unit	259.061.675,81	259.061.675,81	pengadaan	25 Mei 2021	hak Pakai	
5	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0064	Bangunan Gedung Kantor UPT PKU KOTA	Jl. Gajah Mada Pekanbaru			1	unit	4.671.526.124,86	4.671.526.124,86	Alih Status Penggunaan	11 juli 2022	hak Pakai	

6	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0015	Bangunan Gedung Kantor BARU UPT SELAT PANJANG	Jl. Dorak Selat Panjang (Kab. Meranti)			1	unit	5.622.126.384,55	5.622.126.384,55	pengadaan	02 Agustus 2012	hak Pakai	Penambahan nilai bangunan gedung UPT Pengelolaan Pendapatan Meranti tahun 2024 sebesar Rp. 97680000 kajian struktur dan Rp. 91813650 Perencanaan rehab
7	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0016	Bangunan Gedung Kantor UPT BENGKALIS BAGIAN DEPAN	Jl. Antara Bengkalis		Pemerintah Daerah Tk I Riau	1	unit	1.204.264.752,78	1.204.264.752,78	pengadaan	1 Januari 1963	hak Pakai	
8	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0017	Bangunan Gedung Kantor UPT BENGKALIS BAGIAN BELAKANG	Jl. Antara Bengkalis		Pemerintah Daerah Tk I Riau	1	unit	1.378.438.611,62	1.378.438.611,62	pengadaan	17 Desember 2013	hak Pakai	
9	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0018	Bangunan Gedung Kantor UPT TEMBILAHAN	Jl. Pendidikan No.9 Tembilahan		Pemerintah Daerah Tk I Riau	1	unit	2.527.354.636,67	2.527.354.636,67	pengadaan	1 Januari 1963	hak Pakai	
10	1.3.3.01.01.01.001.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0065	Bangunan Gedung Kantor Permanen / Bangunan Gedung Kantor UPT TEMBILAHAN (BELAKANG)	Jl. Pendidikan No.9 Tembilahan		Pemerintah Daerah Tk I Riau	1	unit	1.200.688.415,34	1.200.688.415,34	pengadaan	22 November 2022	hak Pakai	
11	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0060	Bangunan Gedung Samsat Drive	Jl. M. Boya		Pemerintah Provinsi Riau	1	unit	214.002.672,10	214.002.672,10	pengadaan	20 Desember 2021	hak Pakai	

				UPT TEMBILAHAN	Tembilahan										
12	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0026	Bangunan Gedung Kantor UPT BAGAN SI-API-API	Jl. Perwira No. 107 Rokan Hilir		Pemerintah Provinsi Riau	1	unit	962.682.949,98	962.682.949,98	pengadaan	1 Januari 1963	hak Pakai	
13	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0027	Bangunan Gedung Kantor UPT BAGAN BATU	Jl.Lancang Kuning.no 2 Bagan Batu		Pemerintah Daerah Provinsi Riau	1	unit	1.249.248.294,02	1.249.248.294,02	pengadaan	1 Januari 1963	hak Pakai	
14	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0030	Bangunan Gedung Kantor Lama UPT KUANSING	Jl. Proklamasi Taluk			1	unit	590.504.386,00	590.504.386,00	pengadaan	1 Januari 1963	hak Pakai	
15	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0031	Bangunan Gedung Kantor Baru UPT KUANSING	Jl. Proklamasi Taluk			1	unit	5.836.566.700,20	5.836.566.700,20	pengadaan	24 Desember 2013	hak Pakai	penambahan nilai rehab Rp. 437.537.745 dan reklas dari KDP Rp. 36.008.400
16	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0056	Bangunan Gedung Cek Fisik UPT KUANSING Kantor Baru	Jl. Proklamasi Taluk			1	unit	226.167.693,59	226.167.693,59	pengadaan	1 Desember 2016	hak Pakai	
17	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0035	Bangunan Gedung Kantor UPT PELALAWAN	Komp.Perkantoran Dharma Bakti No 2 Kab.Pelalawan		Dinas Pendapatan Provinsi Riau	1	unit	2.137.878.123,93	2.137.878.123,93	pengadaan	1 Januari 1963	hak Pakai	
18	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0074	Bangunan Gedung Kantor UPT PELALAWAN (Baru)	Komp.Perkantoran Dharma Bakti No 2		Dinas Pendapatan Provinsi Riau	1	unit	2.219.163.453,00	2.219.163.453,00	pengadaan	1 Oktober 2024	hak Pakai	gedung kantor Baru UPT Pelalawan

					Kab.Pelalawan										
19	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0059	Bangunan Gedung Samsat DRIVE THRU UPT PELALAWAN	Jl. Lintas Timur Pelalawan			1	unit	214.093.539,12	214.093.539,12	pengadaan	20 Desember 2021	hak Pakai	
20	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0037	Bangunan Gedung Kantor UPT PERAWANG	Jl.Raya Km.7 Perawang		Pemerintah Provinsi Riau	1	unit	972.501.536,49	972.501.536,49	pengadaan	1 Januari 1963	hak Pakai	
21	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0038	Bangunan Gudang Arsip UPT PERAWANG	Jl.Raya Km.7 Perawang		Pemerintah Provinsi Riau	1	unit	78.085.888,80	78.085.888,80	pengadaan	25 April 2012	hak Pakai	
22	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0061	Bangunan Gedung Cek Fisik UPT PERAWANG	Jl.Raya Km.7 Perawang		Pemerintah Provinsi Riau	1	unit	390.946.640,21	390.946.640,21	pengadaan	29 November 2021	hak Pakai	
23	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0040	Bangunan Gedung Kantor UPT BANGKINANG Bagian Belakang (Gedung B)	Jl.Letnan Boyak. No 74		Pemerintah Daerah Tk I Riau	1	unit	833.613.338,27	833.613.338,27	pengadaan	1 Januari 1963	hak Pakai	
24	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0041	Bangunan Gedung Kantor UPT BANGKINANG Bagian Depan (Gedung A)	Jl.Letnan Boyak. No 74		Pemerintah Daerah Tk I Riau	1	unit	1.256.886.470,11	1.256.886.470,11	pengadaan	1 Januari 1963	hak Pakai	
25	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0043	Bangunan Gedung Cek Fisik UPT BANGKINANG	Jl.Letnan Boyak. No 74		Pemerintah Daerah Tk I Riau	1	unit	27.757.206,27	27.757.206,27	pengadaan	1 Januari 2011	hak Pakai	
26	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0048	Bangunan Gedung Kantor UPT DURI	Jl. Harapan Jaya Duri			1	unit	4.679.149.721,84	4.679.149.721,84	pengadaan	26 November 2012	hak Pakai	
27	1.3.3.01.01.01.001.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0014	Gedung kantor permanen/ Kantor UP Pengelolaan Simp. Beringin	Jl. Lintas Timur desa sei Kijang		Pemerintah Provinsi Riau	1	unit	36.666.000,00	36.666.000,00	Alih Status Penggunaan	30 Desember 2022	hak Pakai	

					Pelalawan										
28	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0065	Gedung Samsat Drive Thru Pekanbaru Kota	Jl Gajah Mada Pekanbaru		Pemerintah Provinsi Riau	1	unit	225.306.000,00	225.306.000,00	pengadaan	16 Juni 2023	hak Pakai	
29	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0069	Bangunan Gedung Kantor UPT DUMAI	Jl.Sultan Syarif Qasim Nomor 28 Dumai			1	unit	14.002.720.656,07	14.002.720.656,07	pengadaan	27 Desember 2023	hak Pakai	
30	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0070	GEDUNG CEK FISIK UPT Dumai	Jl.Sultan Syarif Qasim Nomor 28 Dumai			1	unit	727.563.311,70	727.563.311,70	pengadaan	27 Desember 2023	hak Pakai	
31	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0071	Gedung Samsat Drive Thru Dumai	Jl.Sultan Syarif Qasim Nomor 28 Dumai			1	unit	258.719.367,26	258.719.367,26	pengadaan	27 Desember 2023	hak Pakai	
32	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0068	Bangunan Gedung Kantor UPT Siak	Desa Mempura Kec.Mempura Kab.Siak Sri Indra Pura		Pemerintah Provinsi Riau	1	unit	3.928.231.685,00	3.928.231.685,00	pengadaan	8 Agustus 2023	hak Pakai	
33	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0073	Bangunan Gedung bekas kantor pos polhut	Jl. Raya Pekanbaru-Bangkina ng KM. 65 Kumantan		Pemerintah Provinsi Riau	1	unit	108.748.650,00	108.748.650,00	pengadaan	15 Desember 2023	hak Pakai	Rusak Berat
	1.3.3.01.01.02.	BANGUNAN GUDANG						2			592.981.387,00				

34	1.3.3.01.01.02.001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	0002	Bangunan Gudang Arsip DIPENDA	Jl.Jend.Sudirman No.6 Pekanbaru	Pemerintah Daerah Tk I Riau	1	unit	547.940.000,00	547.940.000,00	pengadaan	1 Januari 2003	hak Pakai	
35	1.3.3.01.01.02.001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	0020	Bangunan Gudang Arsip UPT TEMBILAHN	Jl.Pendidikan No.9 Tembilahan	Pemerintah Daerah Tk I Riau	1	unit	45.041.387,00	45.041.387,00	pengadaan	1 Januari 2010	hak Pakai	
	1.3.3.01.01.08.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH					3			1.803.624.734,19				
36	1.3.3.01.01.08.001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	0006	Bangunan Gedung Mesjid AL-KHIDMAH Dipenda Provinsi Riau	Jl.Jend.Sudirman No.6 Pekanbaru	Pemerintah Daerah Tk I Riau	1	unit	582.449.450,64	582.449.450,64	pengadaan	1 Januari 2003	hak Pakai	
37	1.3.3.01.01.08.001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	0023	Bangunan Gedung Mushola UPT TEMBILAHAN	Jl.Pendidikan No.9 Tembilahan	Pemerintah Daerah Tk I Riau	1	unit	1.122.524.133,65	1.122.524.133,65	pengadaan	9 Oktober 2012	hak Pakai	
38	1.3.3.01.01.08.001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	0042	Bangunan Gedung Mushola UPT BANGKINANG	Jl.Letnan Boyak. No 74	Pemerintah Daerah Tk I Riau	1	unit	98.651.149,90	98.651.149,90	pengadaan	1 Januari 1963	hak Pakai	
	1.3.3.01.01.12.	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN /KOPERASI/PASAR					2			237.573.474,49				
39	1.3.3.01.01.12.001	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	0007	Bangunan Gedung Kantin Bapenda Riau	Jl.Jend.Sudirman No.6 Pekanbaru	Pemerintah Daerah Tk I Riau	1	unit	170.241.600,00	170.241.600,00	pengadaan	1 Januari 2003	hak Pakai	
40	1.3.3.01.01.12.001	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	0033	Bangunan Gedung Kantin UPT KUANSING KANTOR BARU	Jl. Proklamsi Taluk		1	unit	67.331.874,49	67.331.874,49	pengadaan	1 Januari 1963	hak Pakai	

	1.3.3.01.01.13.	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA						7			880.310.804,60				
41	1.3.3.01.01.13.001	Gedung Pos Jaga Permanen	0008	Bangunan Gedung Pos Jaga DIPENDA	Jl.Jend.Sudirman No.6 Pekanbaru		Pemerintah Daerah Tk I Riau	3	unit	19.049.176,67	57.147.530,00	pengadaan	1 januari 2003	hak Pakai	
42	1.3.3.01.01.13.001	Gedung Pos Jaga Permanen	0053	Bangunan Gedung Pos Jaga UPT RENGAT KANTOR BARU	Jl Lintas Pematang Reba		Pemerintah Provinsi Riau	1	unit	111.674.812,03	111.674.812,03	pengadaan	21 September 2012	hak Pakai	
43	1.3.3.01.01.13.001	Gedung Pos Jaga Permanen	0066	bangunan pos jaga dan ruangan ATM pada UPT Tembilahan	Jl.Pendidikan No.9 Tembilahan (Inhil)		Pemerintah Provinsi Riau	1	unit	256.313.000,00	256.313.000,00	pengadaan	21 Sep 2023	hak Pakai	
44	1.3.3.01.01.13.001	Gedung Pos Jaga Permanen	0067	bangunan pos jaga dan ruangan ATM pada UPT Pangkalan Kerinci	Komp.Perkantoran Dharma Bakti No 2 Kab.Pelalawan		Pemerintah Provinsi Riau	1	unit	253.498.150,00	253.498.150,00	pengadaan	25 Oct 2023	hak Pakai	
45	1.3.3.01.01.13.001	Gedung Pos Jaga Permanen	0072	bangunan pos jaga dan ruangan ATM pada UPT Dumai	Jl. Sultan syarif qasim dumai			1	unit	201.677.312,57	201.677.312,57	pengadaan	27 Dec 2023	hak Pakai	
	1.3.3.01.01.14.	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL						3			1.546.993.311,30				
46	1.3.3.01.01.14.001	Gedung Garasi/Pool Permanen	0011	Bangunan Gedung Canopi (GARASI) Bapenda	Jl.Jend.Sudirman No.6 Pekanbaru		Pemerintah Daerah Tk I Riau	1	unit	1.371.528.587,33	1.371.528.587,33	pengadaan	29 Februari 2012	hak Pakai	

47	1.3.3.01.01.14.001	Gedung Garasi/Pool Permanen	0022	Bangunan Gedung Canopi UPT TEMBILAHAN	Jl.Pendidikan No.9 Tembilahan		Pemerintah Daerah Tk I Riau	1	unit	30.027.592,00	30.027.592,00	pengadaan	1 Agustus 2013	hak Pakai	
48	1.3.3.01.01.14.001	Gedung Garasi/Pool Permanen	0054	Bangunan Gedung Canopi UPT INHU (RENGAT) KANTOR BARU	Jl Lintas Pematang Reba		Pemerintah Provinsi Riau	1	unit	145.437.131,97	145.437.131,97	pengadaan	10 Mei 2013	hak Pakai	
	1.3.3.01.01.32.	BANGUNAN FASILITAS UMUM						2			72.155.649,36				
49	1.3.3.01.01.32.005.	Bangunan Fasilitas Umum	0005	Bangunan ATM CENTER	Jl.Jend.Sudirman No.6 Pekanbaru		Pemerintah Daerah Tk I Riau	2	unit	72.155.649,36	72.155.649,36	pengadaan	16 Desember 2013	hak Pakai	bangunannya ada 2 sekatnya ada 3
	1.3.3.01.01.25.	BANGUNAN TERBUKA						8			3.438.516.595,22				
50	1.3.3.01.01.25.004	Selasar	0003	Selasar atau Penghubung 2 Gedung/Bangunan	Jl.Jend.Sudirman No.6 Pekanbaru		Pemerintah Daerah Tk I Riau	1	unit	58.704.000,00	58.704.000,00	pengadaan	1 Januari 2003	hak Pakai	
51	1.3.3.01.01.33.001	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	0004	Bangunan Lapangan Parkir Kantor Induk	Jl.Jend.Sudirman No.6 Pekanbaru		Pemerintah Daerah Tk I Riau	1	unit	2.774.315.945,21	2.774.315.945,21	pengadaan	1 Januari 2003	hak Pakai	
52	1.3.3.01.01.33.001	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	0025	Bangunan Lapangan Parkir UPT DUMAI	Jl.Sultan Syarif Qasim Nomor 28 Dumai			1	unit	19.708.109,00	19.708.109,00	pengadaan	1 Januari 2010	hak Pakai	
53	1.3.3.01.01.33.001	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	0036	Bangunan Lapangan Parkir UPT PELALAWAN	Komp.Perkantoran Dharma Bakti No 2 Kab.Pelalawan		Dinas Pendapatan Provinsi Riau	1	unit	44.077.323,14	44.077.323,14	pengadaan	19 Desember 2014	hak Pakai	

54	1.3.3.01.01.33.001	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	0028	Bangunan Lapangan Parkir UPT BAGAN BATU	Jl.Lancang Kuning.no 2 Bagan Batu		Pemerintah Daerah Provinsi Riau	1	unit	79.117.694,06	79.117.694,06	pengadaan	16 Desember 2013	hak Pakai	
55	1.3.3.01.01.33.001	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	0046	Bangunan Lapangan Parkir KANTOR BARU UPT PASIR PENGARAIAN	Komp. Praja Perkantoran Rohul			1	unit	71.030.606,24	71.030.606,24	pengadaan	19 Desember 2014	hak Pakai	
56	1.3.3.01.01.33.001	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	0055	Bangunan Lapangan Parkir UPT INHU (RENGAT) KANTOR BARU	Jl Lintas Pematang Reba		Pemerintah Provinsi Riau	1	unit	198.538.087,69	198.538.087,69	pengadaan	3 November 2014	hak Pakai	
57	1.3.3.01.01.33.001	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	0001	Bangunan Lapangan Parkir Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota	Jl. Gajah Mada No.200 Pekanbaru			1	unit	193.024.829,88	193.024.829,88	pengadaan	08 Desember 2022	hak Pakai	
	1.3.3.01.01.37.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA						5			441.906.981,41				
58	1.3.3.01.01.30.001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	0010	Bangunan Gedung Rumah Genset BAPENDA	Jl.Jend.Sudirman No.6 Pekanbaru		Pemerintah Daerah Tk I Riau	1	unit	42.654.400,00	42.654.400,00	pengadaan	1 Januari 2003	hak Pakai	
59	1.3.3.01.01.30.001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	0021	Bangunan Gedung Rumah Genset UPT TEMBILAHN	Jl.Pendidikan No.9 Tembilahan		Pemerintah Daerah Tk I Riau	1	unit	38.842.139,26	38.842.139,26	pengadaan	27 Oktober 2014	hak Pakai	
60	1.3.3.01.01.30.001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	0050	Bangunan Gedung Rumah Genset UPT DURI KANTOR BARU	Jl. Harapan Jaya Duri			1	unit	39.027.975,27	39.027.975,27	pengadaan	27 Oktober 2014	hak Pakai	

61	1.3.3.01.01.30.001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	0029	Bangunan Gedung Rumah Genset UPT SIAK	Jl. Siak Sri indrapur a Komp Perkantoran siak			1	unit	168.076.954,43	168.076.954,43	pengadaan	16 Desember 2015	hak Pakai	
62	1.3.3.01.01.30.001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	0032	Bangunan Gedung Rumah Genset UPT KUANSING KANTOR BARU	Jl. Proklama si Taluk			1	unit	153.305.512,45	153.305.512,45	pengadaan	16 Desember 2015	hak Pakai	
	1.3.3.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL						1			272.532.868,10				
	1.3.3.01.02.04.	MESS / WISMA / BUNGALOW / TEMPAT PERISTIRAHATAN						1			272.532.868,10				
63	1.3.3.01.02.04.001	Mess /Wisma /Bungalow /Tempat Peristirahatan Permanen	0004	Mess di UPT Pengelolaan Pendapatan Dumai	Jl. Sultan syarif qasim dumai			1	unit	272.532.868,10	272.532.868,10	pengadaan	27 Dec 2023	hak Pakai	
	1.3.3.04.	TUGU TITIK KONTROL/PASTI						8			6.284.390.233,73				
	1.3.3.04.01.	TUGU/TANDA BATAS						8			6.284.390.233,73				
	1.3.3.04.01.04.	PAGAR						8			6.284.390.233,73				
64	1.3.3.04.01.04.001	Pagar Permanen	0019	PAGAR UPT TEMBILAHAN	Jl.Pendidikan No.9 Tembilahan		Pemerintah Daerah Tk I Riau	1	unit	17.516.095,00	17.516.095,00	pengadaan	1 januari 2010	hak Pakai	
65	1.3.3.04.01.04.001	Pagar Permanen	0039	PAGAR UPT PERAWANG	Jl.Raya Km.7 Perawang		Pemerintah Provinsi Riau	1	unit	180.765.424,59	180.765.424,59	pengadaan	27 Oktober 2014	hak Pakai	
66	1.3.3.04.01.04.001	Pagar Permanen	0049	PAGAR UPT DURI KANTOR BARU	Jl. Harapan Jaya Duri			1	unit	1.187.737.431,87	1.187.737.431,87	pengadaan	10 Desember 2013	hak Pakai	

67	1.3.3.04.01.04.001	Pagar Permanen	0052	PAGAR UPT INHU (RENGAT) KANTOR BARU	Jl Lintas Pematang Reba		Pemerintah Provinsi Riau	1	unit	468.344.553,25	468.344.553,25	pengadaan	26 Juni 2012	hak Pakai	
68	1.3.3.04.01.04.001	Pagar Permanen	0045	PAGAR KANTOR BARU UPT PASIR PENGARAIAN	Komp. Praja Perkantoran Rohul			1	unit	1.903.176.714,58	1.903.176.714,58	pengadaan	17 September 2015	hak Pakai	
69	1.3.3.04.01.04.001	Pagar Permanen	0062	PAGAR UPT SIAK SRI INDRAPURA	Jl. Siak Sri Indrapura Komp Perkantoran siak			1	unit	1.040.064.766,14	1.040.064.766,14	pengadaan	30 Desember 2021	hak Pakai	
70	1.3.3.04.01.04.003	Pagar Darurat	0034	PAGAR SENG GELOMBANG UPT KUANSING KANTOR BARU	Jl. Proklamsi Taluk			1	unit	96.984.237,30	96.984.237,30	pengadaan	16 Desember 2015	hak Pakai	
71	1.3.3.04.01.04.003.	Pagar Permanen	0064	Pagar UPT Pengelolaan Pendapatan Dumai	Jl.Sultan Syarif Qasim Nomor 28 Dumai			1	unit	1.389.801.011,00	1.389.801.011,00	pengadaan	13 Mei 2024	hak Pakai	
JUMLAH TOTAL			75								91.020.728.398,82				

Sumber Data : KIB BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2024

Untuk sarana dan prasarana lainnya seperti pada lampiran dokumen LKjIP Bapenda Provinsi Riau Tahun 2024

1.5. Permasalahan Utama

Sebagai perangkat daerah yang bertugas dalam pengelolaan pendapatan yang menjadi kewenangan daerah ada beberapa permasalahan yang masih menjadi kendala BAPENDA Provinsi Riau yaitu :

1. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan perubahan lifestyle (gaya hidup) masyarakat, sehingga pelayanan publik harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, dan kepatuhan.
2. Potensi obyek pajak dan retribusi daerah yang baru harus terus digali dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah.
3. Harmonisasi dengan instansi vertikal, OPD penghasil dalam membangun sebuah sistem yang terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
4. Regulasi terhadap penerapan sanksi kepada wajib pajak dan retribusi daerah belum terakomodir dan terealisasikan dengan baik.
5. Pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik di UPT dan UP Pengelolaan Pendapatan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Kemenpan RB melalui kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik PEKPPP.

1.6. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2023 maka kami lampirkan tindak lanjut hasil evaluasinya sebagai berikut :

**MATRIK TINDAK LANJUT LHE SAKIP
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU**

OPD	NO DAN TGL LHE	NILAI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU	215/LHE/INSP- RIAU/ir.III/VI/2024 27 JUNI 2024	78,35	Kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah membuat indikator kinerja utama yang berkelanjutan dan akan dievaluasi lagi untuk penentuan indikator kinerja utama selanjutnya mengikuti RPD dan RPJMD yang baru. 2. Telah melakukan sosialisasi dalam bentuk rapat dan pelibatan dalam menyusun capaian kinerja tiap tahunnya yang tertuang dalam perjanjian kinerja (PENJA). 3. Telah dilakukan penjuragan kinerja dari mulai staff, eselon 4, eselon 3 hingga eselon 2. 	
			a) perencanaan kinerja		<ol style="list-style-type: none"> 1. agar merumuskan indikator kinerja utama (IKU) Yang smart dan berkelanjutan (Sustainable -tidak diganti dalam satu periode perencanaan Strategis).; 2. agar melakukan sosialisasi kepada setiap pegawai supaya memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan; 3. agar menyelaraskan Kinerja individu dengan kinerja organisasi;
			b) Pengukuran kinerja		<ol style="list-style-type: none"> 1. agar menjadikan pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian pemberian atau pengurangan tunjangan kinerja atau penghasilan 2. agar menjadikan pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan atau penghapusan jabatan baik Struktural maupun fungsional 3. agar menjadikan pengukuran kinerja menjadi dasar yang mempengaruhi penyesuaian (Refocusin) organisasi
			c) pelaporan kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. agar menjadikan pelaporan kinerja menjadi dasar penyusunan strategi atau kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah mengevaluasi laporan kinerja terhadap penilaian pemberian tunjangan TPP ASN setiap bulannya. 2. Data capaian kinerja telah menjadi dasar dalam pemberian reward dan punishment. 3. Telah melakukan pengukuran kinerja yang dijadikan dasar refocusing sub kegiatan melalui rapat evaluasi kinerja kegiatan.
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah menjadikan pelaporan kinerja sebagai dasar perubahan strategi/kebijakan pendapatan secara periodik. 	

OPD	NO DAN TGL LHE	NILAI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
			d) evaluasi akuntabilitas kinerja internal 1. agar melakukan evaluasi kinerja internal pada seluruh bidang atau sub unit 2. agar melakukan evaluasi kinerja internal secara berjenjang 3. agar menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	1. Telah melakukan evaluasi kinerja internal diseluruh bidang secara periodik. 2. Telah melakukan evaluasi kinerja internal secara periodik dan berjenjang di masing-masing bidang. 3. Telah menindaklanjuti rekomendasi evaluasi kinerja internal sebagai bahan strategi/kebijakan pelaksanaan kegiatan berikutnya

Pekanbaru, Juli 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI RIAU



EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19720628 199703 2 004

Sumber Data : Hasil Evaluasi SAKIP BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2023

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis BAPENDA Provinsi Riau

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Riau yang mencakup Visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja pencapaian sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam Bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2024 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

A. Visi

BAPENDA Provinsi Riau dalam rangka mendukung RPJMD Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 melalui dukungan visi Gubernur Riau yaitu Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, bermartabat dan Unggul di Indonesia.

B. Misi

Misi Gubernur Riau yang didukung BAPENDA Provinsi Riau yang tercantum dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 adalah “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

C. Tujuan

Untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi Gubernur tersebut, Bapenda Provinsi Riau merumuskan 1 (satu) tujuan yaitu “Tercapainya Kemandirian Fiskal”.

D. Sasaran

Dalam rangka mewujudkan Tujuan tersebut Bapenda Provinsi Riau memfokuskan pada 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Pendapatan Daerah.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pendapatan Daerah.

E. Indikator Kinerja

Pencapaian sasaran Bapenda Provinsi Riau tersebut diukur dengan beberapa indikator seperti tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan Dan Sasaran
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi Perhitungan Indikator	Satuan	Kondisi Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2024
Tercapainya Kemandirian Fiskal	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Angka Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun n	Rupiah	8.736.933.000.000	5.284.412.065.409
		Rasio Efektifitas PAD	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD Tahun n}}{\text{Target Penerimaan PAD Tahun n}} \times 100\%$	Persen	0	77,91%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	76%	90%

Sumber Data : Revisi Renstra Bapenda Provinsi Riau Tahun 2019-2024

2.2. Perjanjian Kinerja BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau berisikan penugasan dari Gubernur Riau sesuai tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target sehingga target pendapatan dapat dipenuhi. Melalui perjanjian kinerja inilah, kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini telah selaras dengan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dalam mewujudkan Visi dan Misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 2.2.1 sebagai berikut;

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja BAPENDA Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Murni	Target Perubahan
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Angka Pendapatan Asli Daerah	Rp. 5.984.937.544.594	Rp. 6.782.926.126.806
		Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	91	91
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja	Nilai Sakip	80	80

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Kepala BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas pada perjanjian kinerja diawal tahun 2024 terdapat 2 sasaran yaitu sasaran ke 1 dan ke 2, untuk sasaran ke 3 merupakan hasil rekomendasi ketika pembahasan dengan Kemenpan RB sekitar bulan Juli 2023 yang bertempat di Ruang Melati bahwa nilai Sakip dilampirkan juga di perjanjian kinerja Kepala OPD tetapi tidak perlu ditambahkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja BAPENDA Provinsi Riau

Pengukuran capaian kinerja Tahunan merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Perangkat Daerah. Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Gubernur Riau. Penilaian terhadap perjanjian kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan mengevaluasi dan mengukur kinerja.

Ukuran kinerja dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Mengumpulkan dan mengolah data hasil sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2024, merupakan langkah awal dalam penilaian indikator kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya, manfaat dan efektifitas. Pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran Bapenda Provinsi Riau yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Tabel 3.1
Skala Nilai Perangkat Kinerja
Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval nilai realisasi kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber Data : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/ realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Hasil sedang : pencapaian/ realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/ realisasi kinerja belum memenuhi/ masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan

3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi yang dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dalam pelaksanaannya memiliki 2 (dua) indikator sasaran, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja BAPENDA Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian (%) Realisasi/Target
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Angka Pendapatan Asli Daerah	Rp. 6.782.926.126.806	Rp. 5.284.412.065.409	77,91%
		Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	77,91%	77,91%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	91	89	97,80%
3	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja	Nilai Sakip	80	78,35	97,94%

Sumber Data : dokumen capaian IKU Bapenda Provinsi Riau Tahun 2024

Berdasarkan data tabel diatas realisasi capaian kinerja BAPENDa Provinsi Riau Tahun 2024 secara keseluruhan rata rata 91% dan masuk dalam kategori sangat tinggi. Realisasi sasaran strategis yang terendah capaiannya pada sasaran ke 1 (satu) yaitu Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 77.91%. Hal ini disebabkan karena ada beberapa unsur dari PAD yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, Capaian kinerja tertinggi sebesar 97,94% yaitu pada sasaran 3 (tiga) Meningkatnya Kualitas Pelaporan Nilai Sakip.

3.1.1.1 Sasaran 1 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Capaian kinerja sasaran 1 yaitu Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 diukur melalui 2 indikator yaitu Angka Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah. Capaian kinerja sasaran 1 dengan indikator Angka Pendapatan Asli Daerah yang dihitung berdasarkan rumus $\text{Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024} \div \text{Realisasi PAD tahun 2024} \times 100\%$ maka didapat hasil capaian kinerja sebesar 77,91%. Sedangkan capaian kinerja sasaran 1 dengan indikator Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah yang dihitung berdasarkan rumus $\text{Realisasi Penerimaan PAD tahun 2024} \div \text{Target Penerimaan PAD tahun 2024} \times 100\%$ maka didapat hasil capaian kinerja sebesar 77,91%. Hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja dan indikator sehingga untuk sasaran 1 ini masuk dalam kategori capaian tinggi.

3.1.1.1.1 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

Capaian kinerja sasaran 1 Tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 lebih meningkat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024. Dari sasaran strategis pertama dengan 2 (dua) indikator yaitu angka pendapatan asli daerah yang didapat dari total unsur pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain lain yang sah dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan pada satu tahun anggaran, realisasinya mengalami penurunan di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2024			Kinerja Tahun 2023		
			Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Angka Pendapatan Asli Daerah	Rp. 6.782.926.126.806	Rp. 5.284.412.065.409	77,91%	Rp.5.801.084.335.607	Rp.5.777.172.223.862	99,59%
		Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	100%	77,91%	77,91%	100%	99,59%	99,59%

Sumber Data : Hasil Rekon Pendapatan Tahun 2024 dan LKJIP Bapenda Provinsi Riau Tahun 2023

3.1.1.1.2 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Renstra BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2019-2024

Capaian kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan target renstra BAPENDA Provinsi Riau pada tahun 2024 untuk Sasaran strategis 1 dengan 2 (dua) indikator yaitu Angka Pendapatan Asli Daerah sebesar 61,11% yang didapat dari total unsur pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain lain yang sah dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan pada satu tahun anggaran dan indikator Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah sebesar 77,91% yang didapat dengan membandingkan target PAD dengan Realisasi PAD pada satu tahun anggaran. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan target renstra bapenda provinsi riau tahun 2019-2024 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Renstra BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2019-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Tahun 2024	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Angka Pendapatan Asli Daerah	Rp. 6.782.926.126.806	Rp.8.647.077.000.000	Rp. 5.284.412.065.409	61,11%
		Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	100%	100%	77,91%	77,91%

Sumber Data : Hasil Renkon Pendapatan Tahun 2024 dan Perubahan Renstra Bapenda Provinsi Riau Tahun 2019-2024

3.1.1.1.3 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Capaian Nasional

Sasaran Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tidak dibandingkan dengan capaian nasional.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Target Nasional Tahun 2024	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Angka Pendapatan Asli Daerah	Rp. 6.782.926.126.806	0	Rp. 5.284.412.065.409	0
		Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	100%	0	77,91%	0

3.1.1.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan

Pada tahun 2024 BAPENDA Provinsi Riau mengalami penurunan pendapatan, hal ini disebabkan beberapa hal yang menghambat dalam capaian kinerja BAPENDA Provinsi Riau, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat diidentifikasi permasalahan yang diperoleh dari peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan seperti terangkum dibawah ini :

- 1) Adanya beberapa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang didalamnya ada penyertaan modal pada beberapa BUMD yang tidak mencapai target awal sehingga sangat berpengaruh pada efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 2) Perlunya rekonsiliasi dan penyesuaian data kendaraan bermotor dengan Kepolisian dan Jasa Raharja, serta pihak swasta.
- 3) Perlunya penyiapan SDM untuk melakukan pengawasan rutin terhadap objek pajak air permukaan.
- 4) Perlunya peningkatkan koordinasi pengelolaan retribusi bersama OPD pemungut retribusi dan meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi atas pengelolaan retribusi yang ada agar penerimaan retribusi optimal.
- 5) Perlu perhatian sungguh-sungguh pada sumber-sumber pendapatan lainnya berupa BLUD di SMK (pemakaian hotel, laundry, ruang teknisi, dan lain-lain) agar dapat didukung segera menggunakan Peraturan Gubernur sehingga retribusi pada objek tersebut dapat dimanfaatkan dalam peningkatan PAD.

Berdasarkan rangkuman permasalahan tersebut diatas, sudah ditindaklanjuti dengan solusi sebagai berikut :

- 1) Melakukan pendekatan dan koordinasi yang intensif pada tiap-tiap BUMD sehingga terjalin suatu komitmen bersama dalam memenuhi target pendapatan yang ditetapkan setiap tahunnya.
- 2) Secara bertahap sudah dilakukan update dan cleansing data bersama Ditlantas Polda Riau dan Jasa Raharja.
- 3) Menyediakan Anggaran Bimtek terkait Pajak Air Permukaan (PAP) dengan mengundang instruktur yang ahli di bidang PAP yang pesertanya perwakilan pegawai dari UPT/UP yang tupoksinya terkait dengan PAP.

- 4) Pelaksanaan program 5 keringanan pajak kendaraan yang tertuang sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau nomor 35 tahun 2024 tentang Pengurangan atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan dan/atau Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan seterusnya serta Pembebasan Sanksi Administrasi.
- 5) Badan Pendapatan Daerah telah melakukan rapat-rapat koordinasi bersama OPD pemungut retribusi terkait pembayaran secara Non tunai untuk mempermudah pelayanan kepada wajib retribusi. Rapat penyusunan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang HKPD merupakan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan Retribusi Daerah mengakomodir penyesuaian tarif dan pendataan Objek Retribusi baru. Monitoring juga dilakukan kepada seluruh OPD pemungut untuk menginventarisir permasalahan terhadap pengelolaan pada objek-objek retribusi yang belum optimal.
- 6) Melakukan koordinasi yang intensif dengan SMK yang menjadi BLUD dapat lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pendapatan BLUD dengan menyiapkan regulasi yang menjadi dasar hukum pengelolaan pendapatan BLUD.

3.1.1.1.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan capaian kinerja sangat dipengaruhi oleh efektifitas dan efisiensi sumber daya, sarana prasarana dan juga efisiensi anggaran. Berdasarkan dari realisasi fisik keuangan pada akhir tahun anggaran 2024, maka dapat dirangkum beberapa sub kegiatan yang termasuk efisiensi anggaran yaitu :

1. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 584.306.510 terealisasi sebesar Rp. 539.027.000 sehingga persentase capaian keuangannya adalah 92,25% dengan realisasi fisik sebesar 95,25%.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.900.922.760 terealisasi sebesar Rp. 2.596.948.433 sehingga persentase capaian keuangannya 89,52% dengan realisasi fisik sebesar 92,52%.

Untuk sub kegiatan yang kurang baik dalam pelaksanaannya adalah sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran Rp. 310.334.000 hanya terealisasi sebesar Rp. 101.077.427 sehingga capaian

realisasi keuangannya sebesar 32,57% dengan realisasi fisik hanya sebesar 36,57% dan Penagihan Pajak Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 271.250.000 hanya terealisasi sebesar Rp. 117.133.524 dengan realisasi keuangannya sebesar 43,18% dengan realisasi fisik hanya 35,57%, serta sub kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 535.881.000 hanya terealisasi sebesar Rp. 248.332.495 dengan realisasi keuangannya sebesar 46,34% dengan realisasi fisik hanya 49,34%.

Sedangkan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dalam pembayaran pajak kendaraan dilakukan beberapa kegiatan yaitu :

1. Melakukan Operasi penertiban pajak yang dilakukan di beberapa Kota/Kabupaten bekerjasama dengan pihak jasa raharja dan kepolisian.
2. Menerbitkan kebijakan 5 keringan pajak untuk beberapa kriteria sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan dan / Atau Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya Serta Pembebasan Sanksi Administrasi.

Dengan tidak tercapainya 100% target pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2024 tentunya akan berdampak pada rencana belanja pada tahun 2025. Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 tentunya harus disesuaikan dengan capaian PAD sebagai salah satu komponen pendukung dalam pendapatan daerah.

3.1.1.1.6 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran

Program yang mendukung pencapaian sasaran “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” ada 2 program, yaitu:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan beberapa Sub Kegiatan yaitu :
 1. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
 2. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
 4. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 5. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
 6. Penagihan Pajak Daerah

7. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

3.1.1.2 Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pendapatan Daerah

Sasaran ke 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pendapatan Daerah Tahun 2024 diukur melalui indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat. Capaian kinerja sasaran 2 dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang dihitung berdasarkan dengan menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang dikelola oleh Bidang Pengawasan dan Bidang data dengan menggunakan data hasil kepuasan pelayanan dari wajib pajak yang disampling maka didapat hasil capaian kinerja sebesar 89%. Hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja dan indikator sehingga untuk sasaran 2 ini masuk dalam kategori capaian tinggi.

3.1.1.2.1 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

Untuk sasaran 2 capaian kinerja tahun 2024 lebih meningkat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023. Sasaran strategis kedua dengan indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat yang didapat dari menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang dikelola oleh Bidang Pengawasan dan Bidang data dengan menggunakan data hasil kepuasan pelayanan dari wajib pajak yang disampling, realisasinya mengalami peningkatan di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Untuk capaian kinerja sasaran 2 jika dibandingkan dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.6 dibawah ini :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2024			Kinerja Tahun 2023		
			Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	91%	89%	97,80%	92%	87%	94,57%

Sumber Data : Hasil aplikasi survei kepuasan masyarakat Tahun 2024 dan LKJIP Bapenda Provinsi Riau Tahun 2023

3.1.1.2.2 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Renstra BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2019-2024

Capaian kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan target renstra BAPENDA Provinsi Riau pada tahun 2024 untuk Sasaran strategis 2 dengan indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 93,68% yang didapat dari menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang dikelola oleh Bidang Pengawasan dan Bidang data dengan menggunakan data hasil kepuasan pelayanan dari wajib pajak yang disampling. Untuk Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Renstra BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel 3.7 dibawah ini :

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Renstra BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2019-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja 2024	Target Renstra 2024	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	91%	95%	89%	93,68%

Sumber Data : Hasil aplikasi survei kepuasan masyarakat Tahun 2024 dan LKJIP Bapenda Provinsi Riau Tahun 2023

3.1.1.2.3 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Capaian Nasional

Untuk capaian kinerja BAPENDA yang sesuai dengan IKU pada sasaran kedua BAPENDA Provinsi Riau tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Standar Nasional atau Target Nasional

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Target Nasional Tahun 2024	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	91%	0	89%	0%

Sumber Data : Hasil aplikasi survei kepuasan masyarakat Tahun 2024

3.1.1.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan

Pada tahun 2024 BAPENDA Provinsi Riau mengalami penurunan pendapatan, hal ini disebabkan beberapa hal yang menghambat dalam capaian kinerja BAPENDA Provinsi Riau, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Akan tetapi dari sisi survei hasil layanan perpajakan tidak mengalami penurunan, sehingga dianggap masyarakat masih cukup puas dengan layanan yang ada. Akan tetapi pembenahan sarana dan prasarana di UPT pengelolaan pendapatan terus ditingkatkan secara bertahap.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat diidentifikasi permasalahan yang diperoleh dari peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan seperti terangkum dibawah ini :

- 1) Perlu prioritas pembangunan tempat pelayanan UPT Samsat yang layak dan sesuai standar pelayanan publik sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat dan antusiasme wajib pajak untuk membayar pajak.
- 2) Perlunya reward terhadap UPT yang memberikan kontribusi pendapatan lebih tinggi daripada UPT lainnya.

Berdasarkan rangkuman permasalahan tersebut diatas, sudah ditindaklanjuti dengan solusi sebagai berikut :

- 1) Telah dilakukan Pembangunan Gedung UPT Dumai pada tahun 2024 dan Perencanaan Pemeliharaan Gedung yaitu UPT Selat Panjang.
- 2) Sudah dilaksanakan dalam bentuk pemberian prosentase insentif yang lebih besar untuk UPT/UP yang berhasil memenuhi target pendapatan.

3.1.1.2.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan capaian kinerja sangat dipengaruhi oleh efektifitas dan efisiensi sumber daya, sarana prasarana dan juga efisiensi anggaran. Berdasarkan dari realisasi fisik keuangan pada akhir tahun anggaran 2024, maka dapat dirangkum beberapa sub kegiatan yang termasuk efisiensi anggaran yang mendukung sasaran 2 yaitu :

1. Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan pagu anggaran Rp. 687.466.550 terealisasi sebesar 543.881.000 sehingga capaian realisasi anggarannya 79% dan capaian realisasi fisik 82%.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.900.922.760 terealisasi sebesar Rp.

2.596.948.433 sehingga persentase capaian keuangannya 89,52% dengan realisasi fisik sebesar 92,52%.

Untuk sub kegiatan yang kurang baik dalam pelaksanaannya yang berpengaruh pada sasaran 2 adalah Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 201.983.404 hanya terealisasi sebesar Rp. 126.939.863 sehingga serapan anggarannya hanya sebesar 62,85%.

Sedangkan dalam pemenuhan sarana dan prasarana terutama untuk di Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Pendapatan (UPT PP) yang sesuai standar dari Kementerian PAN RB hanya baru terpenuhi beberapa UPT saja karena keterbatasan anggaran. Pemenuhan sarana prasarana dilaksanakan secara bertahap seperti di tahun 2024 pemenuhan sarana prasarana untuk UPT yang dapat dilaksanakan yaitu :

1. Pembangunan Gedung UPT PP Dumai
2. Pemenuhan Fasilitas pendukung layanan UPT seperti mesin hitung uang, printer dot matrix, printer inkjet, komputer all in one, brankas uang dan lainnya yang disebar sesuai pengajuan kebutuhan sarana prasarana UPT pengelolaan pendapatan.

Dengan hampir tercapainya target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 tentunya akan berdampak pada antusiasme Bapenda Provinsi Riau untuk dapat lebih meningkatkan layanan terkait pajak daerah dan retribusi daerah agar lebih mudah diakses serta lebih ramah sesuai kebutuhan wajib pajak.

3.1.1.2.6 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran

Program yang mendukung pencapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pendapatan Daerah” yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Sub Kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
2. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
3. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

3.1.1.3 Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Pelaporan Kinerja

Sasaran ke 3 yaitu Meningkatkan Kualitas Pelaporan Kinerja Tahun 2024 diukur melalui indikator yaitu Nilai SAKIP. Capaian kinerja sasaran 3 dengan indikator Nilai SAKIP Bapenda Provinsi Riau yang dihitung berdasarkan

dengan melakukan penyusunan beberapa dokumen yang dipersyaratkan dalam penilaian SAKIP oleh Inspektorat Provinsi Riau dibawah pengawasan Kemenpan RB maka didapat hasil capaian kinerja sebesar 97,94%. Hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja dan indikator sehingga untuk sasaran 3 ini masuk dalam kategori capaian sangat tinggi.

3.1.1.3.1 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

Untuk sasaran 3 capaian kinerja tahun 2024 lebih kecil dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023. Dimana pada Tahun 2023 capaiannya yaitu 99,54% sementara pada tahun 2024 capaiannya adalah 97,94%. Dari sasaran strategis ketiga dengan indikator yaitu nilai SAKIP yang didapat dengan melakukan penyusunan beberapa dokumen yang dipersyaratkan dalam penilaian SAKIP oleh Inspektorat Provinsi Riau dibawah pengawasan Kemenpan RB, realisasinya mengalami penurunan di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Hal ini dikarenakan target nilai SAKIP Bapenda Riau tahun 2023 lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2024. Untuk capaian kinerja sasaran 3 jika dibandingkan dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.9 dibawah ini:

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2024			Kinerja Tahun 2023		
			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja	Nilai Sakip	80	78,35	97,94%	76	75,65	99,54%

Sumber Data : LHE SAKIP Bapenda Provinsi Riau Tahun 2024 dan LKJIP Bapenda Provinsi Riau Tahun 2023

3.1.1.3.2 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Renstra BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2019-2024

Capaian kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan target renstra BAPENDA Provinsi Riau pada tahun 2024 untuk Sasaran strategis 3 dengan indikator Nilai SAKIP sebesar 0% karena sasaran strategis ketiga yaitu meningkatnya kualitas pelaporan kinerja dengan indikator nilai SAKIP yang didapat dari hasil evaluasi Kementerian PAN RB terkait penilaian SAKIP OPD dimana pada saat penyusunan Renstra masih dijadikan IKU Biro Organisasi, akan tetepi pada pertengahan tahun 2023 pada saat penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja dilimpahkan untuk menjadi IKU Eselon 2 (Kepala OPD) sehingga capaiannya jika dibandingkan akan menghasilkan capaian kinerja 0%. Untuk capaian kinerja sasaran 3 jika dibandingkan dengan target Renstra Bapenda Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel 3.10 dibawah ini :

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Renstra BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2019-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Target Renstra Tahun 2024	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja	Nilai Sakip	80	0	78,35	0%

Sumber Data : LHE SAKIP Bapenda Provinsi Riau Tahun 2024 dan LKJIP Bapenda Provinsi Riau Tahun 2023

3.1.1.3.3 Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Capaian Nasional

Untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelaporan Kinerja dengan indikator Meningkatkan Nilai Sakip tidak dibandingkan dengan capaian nasional karena tidak terdapat pendanaannya pada level nasional. Untuk capaian kinerja sasaran 3 jika dibandingkan dengan target nasional Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.11 dibawah ini :

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perjanjian Kinerja 2024	Target Nasional Tahun 2024	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja	Nilai Sakip	80	0	78,35	0%

3.1.1.3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan

Pada tahun 2024 BAPENDA Provinsi Riau mengalami peningkatan nilai SAKIP yang signifikan dari 75,65 tahun 2023 menjadi 78,35 tahun 2024. Hal ini karena Bapenda Provinsi Riau ingin mendukung pencapaian SAKIP Pemerintah Provinsi Riau dalam mengejar nilai A (nilai SAKIP diatas 80), dimana harus ada lebih dari setengah OPD di Pemerintah Provinsi Riau memiliki nilai A (Nilai SAKIP diatas 80).

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat diidentifikasi permasalahan yang diperoleh dari perolehan nilai SAKIP Bapenda Provinsi Riau yaitu diperlukan lagi peningkatan penerapan dalam hal Evaluasi Akuntabilitas Internal yang harus dilengkapi dengan eviden-eviden yang di persyaratkan.

Berdasarkan rangkuman permasalahan tersebut diatas, sudah ditindaklanjuti dengan solusi yaitu menyiapkan lagi eviden eviden terkait evaluasi yang nantinya dapat ditambahkan untuk menaikkan lagi nilai SAKIP Bapenda Riau tahun berikutnya.

3.1.1.3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan capaian kinerja sangat dipengaruhi oleh efektifitas dan efisiensi sumber daya, sarana prasarana dan juga efisiensi anggaran. Berdasarkan dari realisasi fisik keuangan pada akhir tahun anggaran 2024, maka dapat dirangkum beberapa sub kegiatan yang termasuk efisiensi anggaran yang mendukung sasaran 3 yaitu Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 250.001.015 terealisasi sebesar Rp. 210.738.227 sehingga capaian realisasi keuangannya yaitu 84,29% dan capaian realisasi fisik 87,29%.

Dengan naiknya nilai SAKIP Bapenda Riau tahun 2024 yang mendekati nilai A yaitu sebesar 78,35 maka tentunya akan berdampak pada meningkatnya nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Riau. Harapannya semoga pada tahun 2025 Nilai SAKIP Bapenda Riau dapat mencapai nilai A/(80).

3.1.1.3.6 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran

Program yang mendukung pencapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja” yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

3.2. Realisasi Anggaran

Dalam mencapai capaian kinerja BAPENDA Provinsi Riau yang sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan, sangat didukung oleh anggaran yang terdapat pada beberapa sub kegiatan dalam rangka mencapai kinerja yang ditargetkan seperti tergambar pada table dibawah ini :

Tabel 3.12
Capaian Realisasi Anggaran BAPENDA Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Pagu (Perubahan)	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4x100%	7	8	9=8/7x100%
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Angka Pendapatan Asli Daerah	Rp. 6.782.926.126.806	Rp. 5.284.412.065.409	77,91%	Rp.5.809.898.943	Rp.3.523.818.570	60,65%
		Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	100%	77,91%	77,91%			
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	89	97,80%	Rp. 3.588.389.310	Rp. 3.140.042.103	87,50%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja	Nilai Sakip	80	78,35	97,94%	Rp.250.001.015	Rp. 210.738.227	84,29%

Sumber Data : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2024

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa serapan anggaran terbesar ada pada sub kegiatan yang mendukung indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat dengan capaian realsisasi anggaran sebesar 87,79%. Sedangkan capaian realisasi anggaran terkecil ada pada sub kegiatan yang mendukung indikator angka pendapatan asli daerah dan rasio efektivitas pendapatan asli daerah yaitu sebesar 60,65%.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 merupakan capaian kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan, Renja Tahun 2024 dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau tahun 2019–2024 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun 2024.

Pada tahun 2024 secara keseluruhan kinerja BAPENDA Provinsi Riau cukup berhasil hal ini ditandai dengan capaian kinerja rata-rata diatas 88,28% untuk ke empat indikator yang ditetapkan, walaupun ada indikator yang keberhasilannya kurang baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini juga berdampak pada tahun 2024 BAPENDA Provinsi Riau yang belum memenuhi target untuk mempersiapkan APBD tahun 2025.

Untuk kedepannya BAPENDA Provinsi Riau akan terus meningkatkan kinerja khususnya dalam hal meningkatkan pelayanan dalam rangka kenyamanan wajib pajak. Hal tersebut akan diwujudkan melalui pemenuhan sarana prasarana yang sesuai standar dalam penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh Kementerian PAN RB. Pemenuhan sarana prasarana tersebut difokuskan pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan (UPT PP) sebagai ujung tombak dalam mengelola pendapatan asli daerah. Pemenuhan sarana prasarana tersebut juga akan dilaksanakan secara bertahap menyesuaikan pagu anggaran yang tersedia. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam hal pelayanan juga akan terus dilakukan untuk meningkatkan layanan kepada wajib pajak. Serta berkoordinasi dengan BUMD agar bersama-sama berkomitmen dalam pemenuhan target pendapatan.

4.2. Langkah Strategis

Langkah strategis yang dilakukan BAPENDA Provinsi Riau pada tahun 2024 dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang adalah dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah dengan beberapa langkah sebagai berikut :

A. Intensifikasi Pendapatan Daerah

1. Menindaklanjuti kebijakan Gubernur Riau yaitu Peraturan Gubernur Riau nomor 35 Tahun 2024 tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan dan / Atau Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya Serta Pembebasan Sanksi Administrasi.
2. Optimalisasi pendapatan pajak daerah dengan menerapkan aplikasi penerimaan pajak secara elektronik (on-line system) serta meningkatkan pengelolaan penerimaan retribusi daerah berbasis elektronik.
3. Optimalisasi pelayanan PKB melalui penambahan unit Samsat Keliling, Samsat transaksi antar jemput antar kampung (Samsat Tanjak), Samsat Drive Thru, Mall Pelayanan Publik dan samsat Payment Point bekerjasama dengan Bank Riau Kepri.
4. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah serta peningkatan kinerja pengelolaan BLUD.
5. Pemutakhiran data objek pajak/retribusi melalui Pendataan wajib pajak/retribusi dan Pemutakhiran data administrasi wajib pajak kendaraan bermotor berbasis Nomor Induk Kependudukan.
6. Monitoring, evaluasi dan pemeriksaan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi di tingkat OPD/unit kerja.
7. Penagihan piutang pajak dan pemberian sanksi administratif dan penegakan hukum terhadap wajib pajak/retribusi.
8. Penagihan deviden kepada BUMD yang belum menyetorkan deviden ke kas daerah.
9. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pajak melalui peningkatan kemampuan aparat pemungut pajak/retribusi, pembenahan dan standarisasi ruang pelayanan Samsat, melaksanakan transaksi non tunai/cashless untuk seluruh jenis penerimaan daerah serta pengembangan standar operasional dan prosedur di setiap kantor unit pelayanan pendapatan.

B. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah


1. Penambahan objek pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan baru serta penyesuaian tarif dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah.

2. Penambahan Unit Pelayanan Kesamsatan ke daerah-daerah potensi yang jauh dari jangkauan serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan.
3. Kerjasama pertukaran data konsumsi konsumen pengguna bahan bakar dengan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, serta mengupayakan integrasi sistem pertukaran data dan informasi secara real time.
4. Kerjasama dengan stakeholder dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak serta melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi.
5. Peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU dan DAK serta mengajukan permohonan ke Pemerintah Pusat untuk menyalurkan Kewajiban kurang bayar Dana Bagi Hasil kepada daerah.
6. Optimalisasi realisasi dari potensi PBB-P3 dan PPh melalui kerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau Kepri.
7. Mengupayakan memasukkan DBH Kelapa Sawit kedalam Rancangan Peraturan Pemerintah turunan UU Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), disebabkan daerah penghasil perkebunan berhak memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya terhadap potensi perkebunan dengan mempertimbangkan dampak infrastruktur, lingkungan dan sosial.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPENDA Provinsi Riau Tahun 2024 ini disusun, semoga bermanfaat untuk mengevaluasi kegiatan kedepannya untuk kemajuan Badan Pendapatan Provinsi Riau ke di masa yang akan datang.

Pekanbaru, Februari 2025

Kepala BAPENDA Provinsi Riau


EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19720628 199703 2 004